

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.5 Kesimpulan

Penurunan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu Legislatif 2024 dapat dianalisis sebagai manifestasi dari kegagalan partai dalam mempertahankan basis pemilih inti atau loyalisnya. Sebagai partai berbasis pemilih Islam tradisional, PPP menghadapi tantangan serius berupa pergeseran dukungan dari konstituennya yang beralih ke partai lain yang dianggap lebih relevan dan mampu memenuhi harapan mereka. Fenomena ini mencerminkan ketidakpuasan dan kekecewaan pemilih terhadap PPP, baik akibat dinamika internal partai maupun kebijakan politik yang diambil.

Secara umum, penarikan dukungan pemilih inti PPP dapat dijelaskan oleh sejumlah faktor. Pertama, konflik internal di kalangan elite partai yang terus berulang telah melemahkan soliditas organisasi dan menciptakan persepsi negatif di mata publik. Sejarah panjang konflik internal, mulai dari dualisme kepemimpinan hingga perebutan kekuasaan di tingkat elite, menunjukkan lemahnya kohesi internal partai. Kedua, keterlibatan elite PPP dalam kasus-kasus korupsi turut merusak citra partai sebagai institusi yang dapat dipercaya, sehingga mengikis kepercayaan masyarakat, khususnya pemilih loyal. Ketiga, kebijakan partai yang tidak mengakomodasi kehendak dan aspirasi konstituen di tingkat akar rumput (grassroot) semakin memperburuk situasi.

Pada Pemilu Legislatif 2024, faktor khusus yang memperparah penurunan suara PPP adalah kebijakan partai dalam mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak selaras dengan preferensi pemilih tradisionalnya. Sebagai partai yang identik dengan kelompok Islam tradisional, mayoritas pemilih PPP justru mendukung calon presiden yang memiliki citra Islami kuat, seperti Anies Baswedan. Namun, keputusan PPP untuk mendukung pasangan calon lain yang bertentangan dengan preferensi ini menciptakan perbedaan arah dukungan antara partai dengan basis pemilihnya. Tidak hanya itu, polarisasi juga terjadi di internal partai, di mana sebagian kader mendukung calon presiden lain yang lebih sesuai dengan aspirasi mereka.

Kondisi ini menyebabkan lemahnya efektivitas strategi politik PPP selama masa kampanye. Partai gagal memobilisasi dukungan secara optimal karena adanya perpecahan internal dan ketidakselarasan dengan aspirasi pemilih. Akibatnya, meskipun berbagai strategi politik telah dijalankan, upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan perolehan suara dibandingkan pemilu sebelumnya tidak membuahkan hasil yang signifikan. Fenomena ini menegaskan bahwa keberhasilan partai politik dalam pemilu tidak hanya bergantung pada strategi kampanye, tetapi juga pada kemampuan partai menjaga soliditas internal dan membangun hubungan yang erat dengan basis pemilihnya. Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan PPP untuk meningkatkan efektivitas partai dalam menjaga basis pemilihnya dan mencegah penurunan suara di masa mendatang:

1. Meningkatkan Soliditas Internal Partai

PPP perlu membangun dan memperkuat soliditas di antara para kadernya melalui penyelesaian konflik internal secara menyeluruh. Langkah ini dapat dilakukan dengan menerapkan mekanisme rekonsiliasi yang transparan dan inklusif, melibatkan seluruh elemen partai dalam proses pengambilan keputusan, serta mengurangi potensi dualisme kepemimpinan. Dengan demikian, PPP dapat menciptakan organisasi partai yang stabil dan kohesif, yang penting untuk memenangkan kepercayaan publik.

2. Memperbaiki Citra dan Integritas Partai

Terlibatnya sejumlah elite PPP dalam kasus korupsi telah melemahkan kredibilitas partai di mata publik. Oleh karena itu, partai perlu menerapkan mekanisme seleksi yang lebih ketat bagi para calon kader dan pengurus partai, memastikan mereka memiliki rekam jejak yang bersih. Selain itu, komitmen terhadap pemberantasan korupsi perlu ditegaskan melalui kebijakan internal, seperti pemberian sanksi tegas terhadap kader yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

3. Menyesuaikan Kebijakan Partai dengan Aspirasi Pemilih

Kebijakan PPP dalam mendukung calon presiden pada Pemilu 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keputusan partai dan aspirasi basis pemilih tradisionalnya. Untuk menghindari hal serupa di masa mendatang, PPP

perlu melakukan survei atau kajian mendalam sebelum mengambil keputusan strategis. Dengan memahami preferensi pemilih secara akurat, partai dapat menelaraskan arah kebijakannya dengan kebutuhan dan harapan konstituennya.

4. Memperkuat Komunikasi dengan Basis Pemilih

PPP perlu meningkatkan hubungan dengan pemilihnya, khususnya dari kalangan Islam tradisional yang menjadi basis utamanya. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbanyak kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti forum diskusi, pengajian, atau kegiatan sosial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, partai juga perlu memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan politik yang sesuai dengan identitas dan nilai-nilai yang dianut oleh pemilihnya.

5. Menyusun Strategi Kampanye yang Efektif dan Terarah

Untuk mengembalikan kepercayaan pemilih, PPP perlu menyusun strategi kampanye yang lebih terfokus pada isu-isu yang relevan dengan konstituennya. Misalnya, menonjolkan program-program yang mencerminkan komitmen PPP terhadap nilai-nilai Islam tradisional dan keberpihakan kepada masyarakat bawah. Kampanye juga harus dilakukan secara konsisten dan terkoordinasi di semua tingkatan partai untuk menghindari polarisasi di internal.

4.6 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat sejumlah saran terkait dengan upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi penurunan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu Legislatif mendatang. Saran ini ditujukan kepada beberapa pemangku kepentingan, diantaranya adalah:

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai pengambil keputusan dalam penentuan dukungan calon presiden atau koalisi, perlu melakukan survei mendalam untuk memahami preferensi pemilih tradisionalnya terlebih dahulu agar pilihan politik yang dibuat selaras dengan aspirasi basis pemilihnya. Selain itu, pengurus pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) perlu membuka ruang dialog dengan para kader yang ada

di tingkat pusat hingga anak ranting dan berbagai organisasi pendukungnya untuk memastikan keputusan partai mencerminkan aspirasi mereka.

2. Ketua Umum PPP

Ketua Umum PPP perlu mengambil langkah tegas untuk membersihkan citra partai dengan menindak kasus-kasus korupsi yang melibatkan kader dan menyelesaikan konflik internal secara transparan. Selain itu, Ketua Umum perlu mengupayakan rekonsiliasi dengan melibatkan semua faksi dalam partai untuk meredam konflik internal yang berpotensi melemahkan konsolidasi dan pengakaran PPP di masyarakat.

3. Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu)

Bappilu PPP perlu menyusun strategi pemenangan berbasis data yang relevan dengan aspirasi pemilih, terutama dengan memprioritaskan langkah-langkah yang mencerminkan nilai-nilai partai. Dalam pelaksanaan strategi, Bappilu PPP juga harus memastikan bahwa kader dan simpatisan partai memahami dan mendukung kebijakan partai secara menyeluruh, terutama terkait isu calon presiden, platform kampanye, serta program kerja partai.

4. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP

DPC harus menjalin koordinasi erat secara rutin dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait dengan efektivitas program dan strategi kampanye yang dilakukan agar dapat terus terevaluasi dan terealisasi sesuai dengan arah kebijakan partai. Selain itu, DPC PPP secara internal juga harus membangun hubungan yang erat dengan konstituennya melalui pengadaan forum-forum dialog terbuka, mengakomodasi aspirasi lokal dalam program kerja partai, dan mencegah terjadinya konflik internal antar kader.

5. Konstituen PPP

Konstituen PPP harus terus kritis dan aktif dalam menyuarakan aspirasi kepada partai, khususnya kepada para pengurus di tingkat lokal dan pusat. Jika ada kebijakan partai, seperti dukungan kepada calon presiden, yang dirasa kurang sesuai dengan harapan, gunakan saluran komunikasi yang tersedia untuk menyampaikan pendapat secara konstruktif.